

## A MIXED-METHODS STUDY OF PARTICIPATORY VIDEO-BASED ADVOCACY AMONG INDIGENOUS WOMEN: EXAMINING THE ROLES OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP AND DIGITAL AFFORDANCES THROUGH A RESEARCH PROPOSAL

Margareta Seting Tekwan Beraan<sup>1</sup>, Hamdani<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Magister Manajemen, Universitas Mulawarman, Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi Informatika, Universitas Mulawarman, Indonesia

<sup>2</sup>hamdani@xxx.com

Correspondence		
Email: setingkelawing@gmail.com	No. Telp:	
Submitted: 6 June 2026	Accepted: 15 June 2026	Published: 16 June 2026

### Abstract

*This paper proposes a conceptual framework to explain how transformational leadership among indigenous women influences policy advocacy effectiveness through the utilization of participatory video within the Indigenous Women's Alliance of the Archipelago (Perempuan AMAN). Although digital technologies are increasingly adopted by indigenous and civil society organizations for advocacy purposes, the mechanisms linking women's leadership, visual technologies, and advocacy outcomes remain insufficiently understood. Drawing upon Transformational Leadership Theory, Affordance Theory, and the digital activism literature, this paper develops an integrated framework in which participatory video serves as a catalyst for activating three key digital affordances: visibility affordance, narrative affordance, and collective affordance. These affordances are proposed as mechanisms through which participatory video may enhance advocacy legitimacy, expand support networks, strengthen collective action, and increase influence on policy processes. The proposed framework contributes to the literature by integrating leadership studies, digital technology research, and indigenous women's advocacy, which have largely evolved as separate scholarly domains. Furthermore, this paper outlines a mixed-methods explanatory sequential research design to guide future empirical investigations of the proposed relationships. By providing a theoretically grounded and empirically testable framework, this study offers a research agenda for examining the role of visual digital technologies in empowering indigenous women and advancing community-based policy advocacy.*

**Keywords:** Indigenous women; participatory video; transformational leadership; affordance theory; digital activism; policy advocacy; mixed-methods research.

## INTRODUCTION

Transformasi digital telah mengubah secara fundamental cara organisasi masyarakat sipil, komunitas akar rumput, dan gerakan sosial melakukan advokasi, membangun aksi kolektif, serta memengaruhi proses kebijakan publik. Perkembangan teknologi komunikasi digital memungkinkan kelompok-kelompok yang sebelumnya berada di pinggir untuk memproduksi informasi secara mandiri, membangun narasi alternatif, dan menjangkau audiens yang lebih luas melampaui batas geografis dan institusional. Dalam konteks tersebut, video partisipatif (*participatory video*) semakin banyak digunakan sebagai media yang memungkinkan komunitas mendokumentasikan pengalaman mereka sendiri, menyampaikan aspirasi secara langsung, serta memperkuat strategi advokasi berbasis komunitas.

Bagi masyarakat adat, video partisipatif tidak hanya berfungsi sebagai sarana dokumentasi, tetapi juga sebagai instrumen representasi politik, penguatan identitas kolektif, dan perjuangan hak-hak masyarakat adat. Melalui pendekatan visual yang partisipatif, pengalaman lokal yang sebelumnya tidak terlihat dapat ditransformasikan menjadi narasi yang lebih mudah dipahami oleh publik, media, donor, maupun pembuat kebijakan. Berbagai studi menunjukkan bahwa visual storytelling memiliki potensi untuk meningkatkan

kesadaran publik, memperluas dukungan sosial, dan memperkuat mobilisasi kolektif dalam berbagai gerakan sosial dan lingkungan.

Dalam konteks Indonesia, perempuan adat menghadapi tantangan yang kompleks dan multidimensional. Selain menghadapi ketidaksetaraan gender, mereka juga berhadapan dengan konflik tenurial, degradasi lingkungan, ekspansi industri ekstraktif, serta keterbatasan akses terhadap ruang-ruang pengambilan keputusan. Kondisi tersebut menyebabkan suara, pengalaman, dan kepentingan perempuan adat sering kali kurang terwakili dalam proses perumusan kebijakan yang secara langsung memengaruhi kehidupan mereka. Sebagai respons terhadap situasi tersebut, Persekutuan Perempuan Adat Nusantara (Perempuan AMAN) memanfaatkan berbagai strategi advokasi berbasis komunitas, termasuk penggunaan video partisipatif sebagai media komunikasi dan advokasi.

Dalam beberapa tahun terakhir, Perempuan AMAN semakin aktif memproduksi dan mendistribusikan video yang mendokumentasikan pengalaman perempuan adat dalam mempertahankan wilayah adat, menjaga lingkungan hidup, mengembangkan ekonomi komunitas, serta menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan sosial dan ekologis. Video-video tersebut tidak hanya berfungsi sebagai media dokumentasi, tetapi juga sebagai sarana kampanye publik, pendidikan masyarakat, penguatan jaringan advokasi, dan penyampaian aspirasi kepada para pembuat kebijakan. Namun demikian, mekanisme yang menjelaskan bagaimana penggunaan video partisipatif dapat meningkatkan efektivitas advokasi kebijakan masih belum dipahami secara memadai.

Penelitian terdahulu mengenai advokasi digital umumnya berfokus pada penggunaan media sosial, kampanye daring, aktivisme digital, dan komunikasi jaringan. Berbagai metode telah digunakan, termasuk analisis isi, analisis jaringan sosial, studi kasus kualitatif, etnografi digital, dan *participatory action research*. Meskipun studi-studi tersebut memberikan pemahaman yang penting mengenai pemanfaatan teknologi digital dalam gerakan sosial, sebagian besar penelitian masih memiliki tiga keterbatasan utama. Pertama, fokus penelitian cenderung berada pada teknologi dan proses komunikasi, sementara faktor kepemimpinan organisasi relatif kurang mendapat perhatian. Kedua, sebagian besar penelitian lebih banyak mengkaji media sosial dibandingkan video partisipatif sebagai instrumen advokasi. Ketiga, organisasi perempuan adat masih sangat jarang dijadikan sebagai unit analisis utama dalam literatur advokasi digital dan teknologi komunikasi.

Dalam literatur manajemen dan organisasi, Transformational Leadership Theory menjelaskan bahwa pemimpin mampu memengaruhi perubahan organisasi melalui kemampuan membangun visi bersama, menginspirasi anggota, mendorong inovasi, dan memfasilitasi pembelajaran organisasi. Sementara itu, Affordance Theory menjelaskan bahwa teknologi tidak menghasilkan dampak secara otomatis, melainkan menyediakan berbagai kemungkinan tindakan (*possibilities for action*) yang hanya dapat diwujudkan melalui interaksi antara teknologi dan penggunanya. Meskipun kedua perspektif tersebut berkembang secara luas dalam literatur masing-masing, integrasi antara kepemimpinan transformasional dan affordance digital dalam konteks advokasi perempuan adat masih sangat terbatas.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, artikel ini mengusulkan suatu kerangka konseptual yang mengintegrasikan Transformational Leadership Theory, Affordance Theory, dan literatur digital activism untuk menjelaskan hubungan antara kepemimpinan transformasional, penggunaan video partisipatif, affordance digital, dan efektivitas advokasi kebijakan. Secara khusus, artikel ini mengusulkan bahwa kepemimpinan transformasional berperan dalam mendorong pemanfaatan video partisipatif, yang selanjutnya mengaktifkan tiga affordance digital utama, yaitu *visibility affordance*, *narrative affordance*, dan *collective affordance*, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap efektivitas advokasi kebijakan.

Sebagai sebuah *research proposal paper*, artikel ini tidak melaporkan hasil empiris, melainkan menawarkan model konseptual dan rancangan penelitian yang dapat diuji pada penelitian mendatang. Untuk menguji model yang diusulkan, artikel ini mengembangkan desain *mixed-methods explanatory sequential* yang mengombinasikan survei kuantitatif berbasis PLS-SEM dengan wawancara mendalam sebagai tahap kualitatif lanjutan.

Artikel ini memiliki empat kontribusi utama. Pertama, memperluas penerapan Transformational Leadership Theory ke dalam konteks organisasi perempuan adat yang masih relatif kurang diteliti. Kedua, mengembangkan Affordance Theory dengan mengidentifikasi tiga affordance digital yang relevan dalam konteks advokasi perempuan adat, yaitu *visibility affordance*, *narrative affordance*, dan *collective affordance*. Ketiga, memperkaya literatur digital activism dengan menempatkan video partisipatif sebagai instrumen advokasi yang berbeda dari pendekatan media sosial yang mendominasi penelitian sebelumnya. Keempat, menawarkan agenda penelitian empiris berbasis mixed methods yang dapat digunakan untuk menguji hubungan antara kepemimpinan, teknologi digital, dan efektivitas advokasi dalam organisasi masyarakat adat.

Artikel ini disusun sebagai berikut. Bagian kedua membahas literatur mengenai kepemimpinan transformasional, affordance digital, video partisipatif, dan advokasi digital. Bagian ketiga menjelaskan kerangka konseptual, hipotesis penelitian, serta desain penelitian yang diusulkan. Bagian keempat membahas model analitis yang diusulkan dan kontribusi teoritis yang diharapkan. Bagian kelima membandingkan kerangka yang diusulkan dengan penelitian terdahulu. Bagian terakhir menyajikan kesimpulan dan agenda penelitian masa depan.

## LITERATURE REVIEW

### Digital Advocacy and Participatory Video in Community-Based Organizations

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara fundamental cara organisasi masyarakat sipil, komunitas adat, dan gerakan sosial melakukan advokasi. Digitalisasi memungkinkan aktor-aktor masyarakat sipil untuk memproduksi, mendistribusikan, dan mengelola informasi secara lebih cepat serta menjangkau audiens yang lebih luas dibandingkan pendekatan advokasi konvensional yang bergantung pada pertemuan tatap muka, media cetak, atau mobilisasi fisik. Fenomena ini melahirkan konsep *digital advocacy*, yaitu penggunaan teknologi digital untuk memengaruhi opini publik, membangun dukungan sosial, dan mendorong perubahan kebijakan melalui berbagai bentuk komunikasi berbasis teknologi.

Literatur mengenai *digital activism* dan *digital advocacy* menunjukkan bahwa teknologi digital memainkan peran penting dalam meningkatkan visibilitas isu, memperluas jaringan dukungan, dan memperkuat kapasitas mobilisasi kolektif. Castells (2015) menjelaskan bahwa teknologi jaringan telah mengubah struktur gerakan sosial modern dengan memungkinkan terbentuknya ruang komunikasi yang lebih horizontal dan partisipatif. Demikian pula, Earl dan Kimport (2011) menunjukkan bahwa media digital mampu mengurangi hambatan partisipasi sehingga memungkinkan kelompok-kelompok marjinal untuk terlibat dalam proses advokasi publik.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian advokasi digital masih berfokus pada media sosial seperti Facebook, X (Twitter), Instagram, atau YouTube sebagai sarana utama mobilisasi dan kampanye. Pendekatan tersebut cenderung menempatkan komunitas sebagai konsumen informasi atau partisipan kampanye, bukan sebagai produsen utama narasi advokasi. Akibatnya, dimensi representasi dan kontrol atas produksi pesan sering kali kurang mendapatkan perhatian dalam literatur advokasi digital.

Salah satu pendekatan yang menawarkan perspektif berbeda adalah *participatory video*. Berbeda dengan produksi media konvensional yang dikendalikan oleh pihak eksternal,

video partisipatif menempatkan anggota komunitas sebagai aktor utama dalam seluruh proses produksi media, mulai dari identifikasi isu, penyusunan narasi, pengambilan gambar, hingga diseminasi pesan. Dengan demikian, video partisipatif tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan komunitas dan produksi pengetahuan berbasis pengalaman lokal.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa video partisipatif memiliki berbagai manfaat dalam konteks pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kindon (2003) menemukan bahwa video partisipatif dapat memperkuat kapasitas refleksi kritis dan partisipasi komunitas dalam proses pengambilan keputusan. Lunch dan Lunch (2006) menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu meningkatkan kepercayaan diri komunitas dalam menyampaikan aspirasi kepada pihak eksternal. Sementara itu, Johansson et al. (2019) menemukan bahwa video partisipatif dapat memperkuat kapasitas advokasi kelompok rentan melalui peningkatan visibilitas isu dan legitimasi suara komunitas.

Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih didominasi oleh studi kasus kualitatif yang berfokus pada proses produksi video atau dampak pemberdayaan pada tingkat individu dan komunitas. Relatif sedikit penelitian yang secara sistematis mengkaji bagaimana video partisipatif berkontribusi terhadap efektivitas advokasi kebijakan. Selain itu, penelitian terdahulu masih jarang mengintegrasikan perspektif organisasi dan kepemimpinan dalam menjelaskan keberhasilan penggunaan video partisipatif sebagai instrumen advokasi.

Keterbatasan lainnya adalah minimnya penelitian yang berfokus pada perempuan adat sebagai aktor utama advokasi digital. Sebagian besar studi dilakukan pada organisasi masyarakat sipil umum, organisasi lingkungan hidup, atau gerakan sosial perkotaan. Padahal, perempuan adat menghadapi tantangan sosial, budaya, dan politik yang berbeda sehingga kemungkinan memiliki pola penggunaan teknologi dan strategi advokasi yang khas.

Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini berargumen bahwa efektivitas video partisipatif tidak hanya ditentukan oleh karakteristik teknologi itu sendiri, tetapi juga oleh kapasitas organisasi dan kepemimpinan yang mengelola pemanfaatannya. Oleh karena itu, diperlukan kerangka teoritis yang mampu menjelaskan bagaimana faktor kepemimpinan memengaruhi penggunaan teknologi digital dalam mendukung advokasi kebijakan.

### **Transformational Leadership and Digital Affordance Theory**

Dalam literatur organisasi, kepemimpinan dipandang sebagai faktor strategis yang memengaruhi kemampuan organisasi dalam mengadopsi inovasi, mengelola perubahan, dan mencapai tujuan kolektif. Salah satu pendekatan yang paling banyak digunakan untuk menjelaskan proses perubahan organisasi adalah *Transformational Leadership Theory* yang diperkenalkan oleh Bass (1985) dan kemudian dikembangkan oleh Bass dan Avolio (2002).

Teori ini menjelaskan bahwa pemimpin transformasional mampu menginspirasi anggota organisasi untuk melampaui kepentingan pribadi demi mencapai tujuan bersama yang lebih besar. Kepemimpinan transformasional terdiri atas empat dimensi utama, yaitu *idealized influence*, *inspirational motivation*, *intellectual stimulation*, dan *individualized consideration*. Melalui keempat dimensi tersebut, pemimpin dapat membangun visi bersama, meningkatkan komitmen anggota, mendorong inovasi, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran organisasi.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional berpengaruh positif terhadap inovasi organisasi, adopsi teknologi, kinerja organisasi, dan kapasitas perubahan. Dalam konteks transformasi digital, pemimpin transformasional berperan penting dalam menciptakan kesiapan organisasi untuk menerima teknologi baru dan memanfaatkannya secara strategis. Namun demikian, sebagian besar penelitian mengenai kepemimpinan transformasional dilakukan dalam konteks organisasi bisnis, sektor publik,

atau institusi pendidikan. Penelitian mengenai peran kepemimpinan transformasional dalam organisasi perempuan adat masih sangat terbatas.

Meskipun teori kepemimpinan mampu menjelaskan bagaimana pemimpin mendorong penggunaan teknologi, teori ini belum menjelaskan bagaimana teknologi menghasilkan dampak sosial tertentu. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini mengadopsi *Affordance Theory* sebagai perspektif pelengkap.

*Affordance Theory* pertama kali diperkenalkan oleh Gibson (1979) dalam kajian psikologi ekologis dan kemudian dikembangkan dalam studi teknologi oleh Hutchby (2001), Leonardi (2011), serta Treem dan Leonardi (2013). Teori ini berargumen bahwa teknologi menyediakan berbagai kemungkinan tindakan (*possibilities for action*), namun dampak teknologi tidak muncul secara otomatis. Dampak tersebut bergantung pada bagaimana pengguna memahami, menginterpretasikan, dan memanfaatkan karakteristik teknologi dalam konteks sosial tertentu.

Dalam konteks teknologi digital, *affordance* menjelaskan mekanisme yang menghubungkan karakteristik teknologi dengan tindakan organisasi. Treem dan Leonardi (2013) menunjukkan bahwa teknologi digital memungkinkan munculnya berbagai *affordances* seperti visibilitas, asosiasi, persistensi, dan editabilitas yang memengaruhi pola komunikasi dan kolaborasi organisasi. Perspektif ini semakin banyak digunakan untuk menjelaskan bagaimana teknologi digital menghasilkan perubahan organisasi dan sosial.

Artikel ini mengembangkan tiga *affordance* yang dipandang paling relevan dengan konteks advokasi perempuan adat. Pertama, *visibility affordance*, yaitu kemampuan video partisipatif untuk meningkatkan keterlihatan isu, pengalaman, dan aspirasi perempuan adat di ruang publik. Kedua, *narrative affordance*, yaitu kemampuan video untuk memberikan kontrol kepada perempuan adat dalam membangun dan menyebarkan narasi mereka sendiri. Ketiga, *collective affordance*, yaitu kemampuan video untuk memperkuat koordinasi, solidaritas, dan aksi kolektif antar komunitas adat yang tersebar secara geografis.

Meskipun literatur *affordance* berkembang pesat dalam konteks media sosial dan organisasi bisnis, penelitian mengenai *affordance* dalam organisasi masyarakat adat masih sangat terbatas. Selain itu, hubungan antara kepemimpinan transformasional dan aktivasi *affordance* digital hampir belum pernah diuji secara sistematis dalam konteks advokasi berbasis komunitas.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, artikel ini mengusulkan integrasi antara *Transformational Leadership Theory* dan *Affordance Theory* untuk menjelaskan bagaimana pemimpin perempuan adat dapat memobilisasi penggunaan video partisipatif sehingga menghasilkan berbagai *affordance* digital yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas advokasi kebijakan.

### Research Gap and Conceptual Positioning

Berdasarkan kajian literatur, terdapat empat kesenjangan penelitian utama yang menjadi landasan pengembangan model konseptual ini.

Pertama, literatur advokasi digital masih didominasi oleh penelitian mengenai media sosial, sementara penggunaan video partisipatif sebagai instrumen advokasi kebijakan masih relatif kurang mendapat perhatian.

Kedua, penelitian terdahulu lebih banyak menekankan aspek komunikasi dan teknologi, sementara peran kepemimpinan organisasi sebagai faktor yang memengaruhi pemanfaatan teknologi digital masih kurang dieksplorasi.

Ketiga, penelitian *affordance* sebagian besar dilakukan pada organisasi bisnis dan lingkungan kerja digital, sehingga masih sedikit bukti mengenai bagaimana *affordance* digital bekerja dalam organisasi masyarakat adat dan gerakan perempuan adat.

Keempat, organisasi Perempuan AMAN dan perempuan adat secara umum masih sangat jarang menjadi fokus penelitian dalam literatur kepemimpinan, teknologi digital, maupun advokasi kebijakan.

Untuk mengisi kesenjangan tersebut, artikel ini mengembangkan sebuah kerangka konseptual yang mengintegrasikan kepemimpinan transformasional, penggunaan video partisipatif, dan affordance digital sebagai mekanisme yang menjelaskan efektivitas advokasi kebijakan. Kerangka tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam model penelitian dan hipotesis yang akan diuji melalui desain *mixed-methods explanatory sequential* pada penelitian empiris mendatang.

## PROPOSED RESEARCH DESIGN AND ANALYTICAL FRAMEWORK

Penelitian ini mengusulkan desain *Mixed Methods Explanatory Sequential* untuk menguji hubungan antara kepemimpinan transformasional, penggunaan video partisipatif, affordance digital, dan efektivitas advokasi kebijakan dalam organisasi Persekutuan Perempuan Adat Nusantara (Perempuan AMAN). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antar konstruk sekaligus menjelaskan mekanisme sosial yang mendasari hubungan tersebut.

Menurut Creswell dan Plano Clark (2018), desain *Explanatory Sequential Mixed Methods* terdiri atas dua tahap utama yang dilakukan secara berurutan. Tahap pertama menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji model konseptual dan hipotesis penelitian. Tahap kedua menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan hasil-hasil kuantitatif yang diperoleh pada fase sebelumnya. Pendekatan ini dipandang sesuai dengan tujuan penelitian karena hubungan antara kepemimpinan, teknologi digital, dan efektivitas advokasi tidak hanya memerlukan pengujian statistik, tetapi juga pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengalaman dan praktik advokasi perempuan adat.

Kerangka konseptual yang diusulkan terdiri atas empat konstruk utama, yaitu **Transformational Leadership (TL)**, **Participatory Video Utilization (PV)**, **Digital Affordances (DA)**, dan **Advocacy Effectiveness (AE)**. Dalam penelitian ini, Digital Affordances dioperasionalkan melalui tiga dimensi utama, yaitu **Visibility Affordance (VA)**, **Narrative Affordance (NA)**, dan **Collective Affordance (CA)**.

Secara konseptual, model penelitian mengasumsikan bahwa kepemimpinan transformasional berperan dalam mendorong penggunaan video partisipatif sebagai instrumen advokasi. Penggunaan video partisipatif selanjutnya memungkinkan aktivasi berbagai affordance digital yang berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas advokasi kebijakan. Hubungan antar konstruk tersebut dirumuskan dalam bentuk hipotesis yang akan diuji pada penelitian empiris mendatang.

## Proposed Research Procedure

Tahapan penelitian yang diusulkan terdiri atas sembilan langkah utama sebagai berikut:

1. Pengembangan model konseptual berdasarkan Transformational Leadership Theory dan Affordance Theory.
2. Penyusunan instrumen penelitian dan validasi isi (*content validity*).
3. Pelaksanaan *pilot study* untuk menguji kejelasan instrumen.
4. Pengumpulan data kuantitatif melalui survei anggota Perempuan AMAN.
5. Analisis model pengukuran dan model struktural menggunakan PLS-SEM.
6. Identifikasi kelompok responden berdasarkan hasil analisis kuantitatif.
7. Pelaksanaan wawancara mendalam terhadap informan terpilih.
8. Analisis tematik terhadap data kualitatif.

9. Integrasi hasil kuantitatif dan kualitatif untuk menghasilkan interpretasi yang lebih komprehensif.

### Algorithm 1. Proposed Mixed-Methods Research Framework

**INPUT:** Data survei anggota Perempuan AMAN dan data wawancara mendalam

**OUTPUT:** Model empiris mengenai hubungan kepemimpinan transformasional, video partisipatif, affordance digital, dan efektivitas advokasi

- 1: Mengembangkan model konseptual dan hipotesis penelitian
- 2: Menyusun instrumen penelitian
- 3: Melakukan *pilot testing*
- 4: Mengumpulkan data survei
- 5: Menguji validitas dan reliabilitas konstruk
- 6: Mengestimasi model struktural menggunakan PLS-SEM
- 7: Mengidentifikasi informan untuk fase kualitatif
- 8: Melaksanakan wawancara mendalam
- 9: Melakukan analisis tematik
- 10: Mengintegrasikan hasil kuantitatif dan kualitatif
- 11: Menyusun implikasi teoritis dan praktis

### Proposed Quantitative Phase

Fase kuantitatif diusulkan untuk menguji hubungan antar konstruk yang terdapat dalam model penelitian. Populasi penelitian adalah anggota Perempuan AMAN yang terlibat dalam aktivitas advokasi organisasi di berbagai wilayah Indonesia.

Instrumen penelitian dirancang menggunakan skala Likert lima poin (1 = sangat tidak setuju hingga 5 = sangat setuju). Konstruk yang diukur meliputi Transformational Leadership, Participatory Video Utilization, Visibility Affordance, Narrative Affordance, Collective Affordance, dan Advocacy Effectiveness.

Analisis data direncanakan menggunakan perangkat lunak SmartPLS 4. Evaluasi model akan mencakup:

- Validitas konvergen;
- Validitas diskriminan;
- Reliabilitas konstruk;
- Koefisien determinasi ( $R^2$ );
- Predictive relevance ( $Q^2$ );
- Effect size ( $f^2$ );
- Pengujian hipotesis melalui prosedur bootstrapping.

### Proposed Qualitative Phase

Fase kualitatif dirancang untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam terhadap hasil-hasil kuantitatif. Informan akan dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan variasi skor konstruk yang diperoleh pada fase survei.

Wawancara mendalam akan difokuskan pada pengalaman penggunaan video partisipatif, praktik kepemimpinan perempuan adat, serta proses aktivasi affordance digital dalam kegiatan advokasi sehari-hari.

Data kualitatif akan dianalisis menggunakan pendekatan thematic analysis yang mencakup:

1. Transkripsi data;
2. Open coding;
3. Axial coding;
4. Pengembangan tema;

5. Interpretasi dan integrasi hasil.

### Proposed Structural Model

Untuk menguji hubungan yang diusulkan dalam model konseptual, penelitian mendatang direncanakan menggunakan pendekatan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM).

Hubungan antara kepemimpinan transformasional dan penggunaan video partisipatif dirumuskan sebagai:

$$PV = \beta_1 TL + \varepsilon \quad (1)$$

di mana PV merepresentasikan tingkat penggunaan video partisipatif dan TL merepresentasikan kepemimpinan transformasional.

Selanjutnya, hubungan antara affordance digital dan efektivitas advokasi dirumuskan sebagai:

$$AE = \beta_2 VA + \beta_3 NA + \beta_4 CA + \varepsilon \quad (2)$$

di mana AE menunjukkan efektivitas advokasi, sedangkan VA, NA, dan CA masing-masing merepresentasikan visibility affordance, narrative affordance, dan collective affordance.

Model struktural lengkap yang diusulkan dapat dinyatakan sebagai:

$$AE = f(TL, PV, VA, NA, CA) \quad (3)$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas advokasi dipengaruhi secara langsung maupun tidak langsung oleh kepemimpinan transformasional, penggunaan video partisipatif, dan affordance digital yang dihasilkan dari pemanfaatan teknologi tersebut.

### Proposed Research Proposition

Berdasarkan integrasi Transformational Leadership Theory dan Affordance Theory, artikel ini mengajukan proposisi konseptual bahwa semakin tinggi tingkat kepemimpinan transformasional dalam organisasi perempuan adat, semakin besar kemampuan organisasi dalam memanfaatkan video partisipatif untuk mengaktifkan visibility affordance, narrative affordance, dan collective affordance yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas advokasi kebijakan.

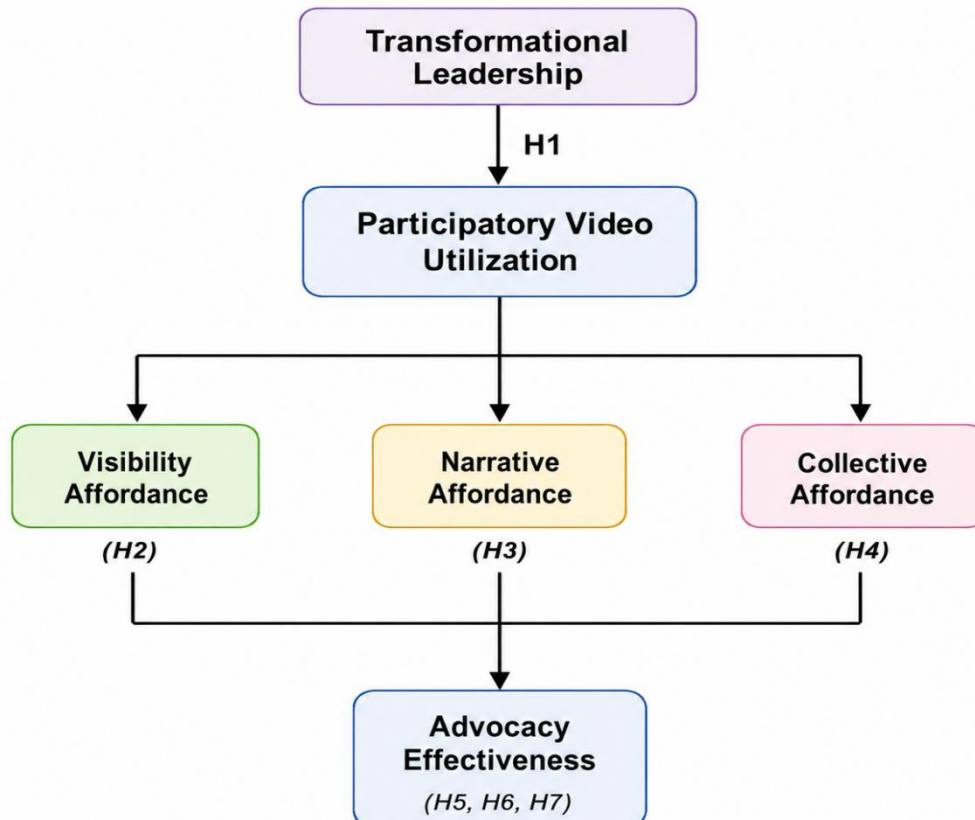
Proposisi tersebut menjadi dasar pengembangan hipotesis penelitian yang akan diuji secara empiris pada penelitian selanjutnya menggunakan desain mixed methods yang diusulkan.

## CONCEPTUAL DISCUSSION AND EXPECTED CONTRIBUTIONS

### Proposed Structural Research Model

Artikel ini mengusulkan suatu model konseptual yang mengintegrasikan **Transformational Leadership Theory** dan **Affordance Theory** untuk menjelaskan bagaimana penggunaan video partisipatif dapat meningkatkan efektivitas advokasi kebijakan dalam organisasi perempuan adat.

Figure 1. Proposed Structural Research Model



Sebagaimana ditunjukkan pada Fig. 1, model yang diusulkan berangkat dari asumsi bahwa kepemimpinan transformasional merupakan faktor organisasi yang mendorong pemanfaatan video partisipatif dalam aktivitas advokasi. Selanjutnya, penggunaan video partisipatif dipandang sebagai mekanisme yang memungkinkan aktivasi berbagai affordance digital yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas advokasi kebijakan.

Berbeda dengan pendekatan deterministik yang menganggap teknologi secara otomatis menghasilkan perubahan sosial, model ini berargumen bahwa dampak teknologi muncul melalui affordances yang berhasil diaktifkan oleh pengguna dalam konteks organisasi tertentu. Dengan demikian, pemimpin perempuan adat berperan sebagai aktor yang menghubungkan kapasitas organisasi dengan potensi teknologi digital.

### Conceptual Interpretation of Proposed Relationships

Hubungan pertama yang diusulkan dalam model adalah pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap penggunaan video partisipatif (H1). Literatur kepemimpinan menunjukkan bahwa pemimpin transformasional mampu mendorong inovasi, membangun visi kolektif, dan meningkatkan partisipasi anggota organisasi. Dalam konteks organisasi

perempuan adat, karakteristik tersebut diperkirakan mendorong adopsi dan pemanfaatan teknologi visual sebagai instrumen advokasi.

Selanjutnya, penggunaan video partisipatif diperkirakan berkontribusi terhadap munculnya tiga affordance utama.

### **Visibility Affordance**

Visibility affordance mengacu pada kemampuan video partisipatif untuk meningkatkan keterlihatan pengalaman, aspirasi, dan isu-isu yang dihadapi perempuan adat. Melalui dokumentasi visual yang diproduksi sendiri oleh komunitas, isu-isu lokal dapat menjadi lebih mudah diakses oleh pemerintah, media, donor, maupun masyarakat luas.

### **Narrative Affordance**

Narrative affordance merujuk pada kemampuan video partisipatif untuk memberikan kontrol yang lebih besar kepada perempuan adat dalam membangun dan menyebarkan narasi mereka sendiri. Affordance ini penting karena memungkinkan komunitas mengurangi ketergantungan pada representasi yang dibangun oleh pihak eksternal.

### **Collective Affordance**

Collective affordance mengacu pada kemampuan video partisipatif untuk memperkuat koordinasi, pembelajaran, dan solidaritas antar komunitas. Melalui pertukaran pengalaman dan dokumentasi praktik advokasi, komunitas adat dapat membangun kapasitas kolektif yang lebih kuat dalam memperjuangkan kepentingan mereka.

### **Expected Theoretical Contributions**

Model konseptual yang diusulkan memberikan beberapa kontribusi teoritis.

#### **Pertama: Integrasi Kepemimpinan dan Teknologi Digital**

Sebagian besar penelitian mengenai kepemimpinan transformasional berfokus pada kinerja organisasi, inovasi, atau perubahan organisasi. Artikel ini memperluas cakupan teori tersebut dengan menunjukkan bagaimana kepemimpinan dapat berperan dalam memobilisasi penggunaan teknologi digital untuk tujuan advokasi kebijakan.

#### **Kedua: Pengembangan Affordance Theory**

Literatur affordance selama ini banyak berkembang dalam konteks organisasi bisnis dan platform media sosial. Artikel ini memperluas penerapan teori tersebut ke dalam konteks organisasi perempuan adat dengan mengidentifikasi tiga affordance yang relevan, yaitu visibility affordance, narrative affordance, dan collective affordance.

#### **Ketiga: Kontribusi terhadap Literatur Digital Advocacy**

Penelitian mengenai advokasi digital masih didominasi oleh kajian media sosial. Artikel ini menunjukkan bahwa video partisipatif merupakan bentuk teknologi digital yang memiliki karakteristik berbeda karena memungkinkan komunitas menjadi produsen utama pesan dan narasi advokasi.

#### **Keempat: Kontribusi terhadap Kajian Perempuan Adat**

Organisasi perempuan adat masih relatif kurang mendapat perhatian dalam literatur manajemen, kepemimpinan, dan teknologi digital. Model yang diusulkan memberikan perspektif baru mengenai bagaimana perempuan adat memanfaatkan teknologi visual untuk memperkuat posisi mereka dalam proses advokasi kebijakan.

### Expected Practical Implications

Apabila hubungan yang diusulkan dalam model memperoleh dukungan empiris pada penelitian mendatang, terdapat beberapa implikasi praktis yang penting.

Pertama, organisasi masyarakat adat dapat memperkuat efektivitas advokasi dengan mengembangkan kapasitas kepemimpinan transformasional di tingkat komunitas.

Kedua, program penguatan organisasi perempuan adat perlu mempertimbangkan investasi pada pelatihan produksi video partisipatif sebagai bagian dari strategi advokasi yang lebih luas.

Ketiga, lembaga donor dan organisasi pembangunan dapat menggunakan video partisipatif sebagai instrumen untuk meningkatkan representasi perempuan adat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Keempat, pemerintah dan pembuat kebijakan dapat memanfaatkan dokumentasi visual berbasis komunitas sebagai sumber informasi yang lebih inklusif dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat adat.

### Conceptual Synthesis

Secara keseluruhan, model yang diusulkan menunjukkan bahwa hubungan antara kepemimpinan transformasional dan efektivitas advokasi tidak bersifat langsung. Pengaruh tersebut diperkirakan terjadi melalui dua mekanisme utama, yaitu penggunaan video partisipatif dan aktivasi *affordance* digital yang dihasilkan dari interaksi antara teknologi, kepemimpinan, dan praktik organisasi.

Dengan demikian, artikel ini mendukung argumen utama *Affordance Theory* bahwa teknologi tidak menghasilkan dampak sosial secara otomatis. Sebaliknya, dampak tersebut muncul ketika aktor organisasi mampu mengidentifikasi, memanfaatkan, dan mengaktivasi kemungkinan tindakan yang disediakan oleh teknologi dalam konteks sosial tertentu. Dalam konteks perempuan adat, kepemimpinan transformasional diposisikan sebagai faktor kunci yang memungkinkan proses aktivasi tersebut terjadi secara efektif.

### Comparison with State-of-the-Art Literature

Penelitian mengenai advokasi digital telah berkembang secara signifikan selama dua dekade terakhir. Literatur yang ada menunjukkan bahwa teknologi digital memainkan peran penting dalam meningkatkan visibilitas isu, memperluas jaringan dukungan, serta memobilisasi partisipasi publik dalam berbagai gerakan sosial dan kebijakan. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada penggunaan platform media sosial dan komunikasi digital secara umum, sementara perhatian terhadap video partisipatif sebagai instrumen advokasi berbasis komunitas masih relatif terbatas.

Selain itu, penelitian terdahulu umumnya menempatkan teknologi digital sebagai sarana komunikasi atau mobilisasi, tanpa memberikan penjelasan yang memadai mengenai faktor organisasi yang memungkinkan teknologi tersebut menghasilkan dampak advokasi yang efektif. Secara khusus, hubungan antara kepemimpinan organisasi, penggunaan teknologi digital, dan efektivitas advokasi masih belum banyak dijelaskan dalam satu kerangka teoritis yang terintegrasi.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, artikel ini mengusulkan model konseptual yang mengintegrasikan *Transformational Leadership Theory* dan *Affordance Theory* untuk menjelaskan bagaimana penggunaan video partisipatif dapat mendukung efektivitas advokasi kebijakan dalam organisasi perempuan adat. Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, model yang diusulkan memberikan perspektif yang lebih komprehensif karena tidak hanya menjelaskan penggunaan teknologi digital, tetapi juga mekanisme sosial dan organisasi yang mendasari pemanfaatannya.

**Table 3. Comparison Between Existing Literature and the Proposed Conceptual Framework**

Aspect	Existing Literature	Proposed Conceptual Framework
Primary Research Focus	Digital activism and social media campaigns	Participatory video-based policy advocacy
Dominant Digital Technology	Social media platforms	Participatory video
Main Theoretical Perspective	Communication theory, social movement theory, digital activism	Transformational Leadership Theory and Affordance Theory
Unit of Analysis	NGOs, civil society organizations, social movements	Indigenous women’s organization (Perempuan AMAN)
Leadership Perspective	Often treated as a contextual factor or omitted	Central explanatory mechanism
Technology Mechanism	Information dissemination and mobilization	Visibility, narrative, and collective affordances
Conceptual Contribution	Explaining digital participation and mobilization	Explaining how leadership activates digital affordances to enhance advocacy effectiveness
Methodological Direction	Predominantly qualitative case studies	Mixed-methods explanatory sequential design proposed for future testing
Policy Orientation	Awareness raising and public engagement	Policy advocacy effectiveness and influence

Sebagaimana ditunjukkan pada Table 3, terdapat beberapa aspek yang membedakan model konseptual yang diusulkan dari literatur sebelumnya.

Pertama, artikel ini mengalihkan perhatian dari media sosial sebagai objek utama advokasi digital menuju video partisipatif sebagai teknologi yang memungkinkan komunitas memproduksi dan mengendalikan narasi mereka sendiri. Perspektif ini penting karena organisasi masyarakat adat sering menghadapi keterbatasan representasi dalam media arus utama maupun platform digital yang didominasi oleh aktor eksternal.

Kedua, artikel ini menempatkan kepemimpinan transformasional sebagai mekanisme penjelas utama dalam pemanfaatan teknologi digital. Sebagian besar penelitian advokasi digital cenderung berfokus pada karakteristik teknologi atau dinamika jaringan sosial, sementara peran kepemimpinan organisasi relatif kurang mendapat perhatian. Model yang diusulkan berargumen bahwa efektivitas teknologi digital sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemimpin dalam membangun visi bersama, mendorong partisipasi anggota, dan memfasilitasi inovasi organisasi.

Ketiga, artikel ini memperluas penerapan Affordance Theory ke dalam konteks organisasi perempuan adat dengan mengembangkan tiga affordance utama, yaitu visibility



affordance, narrative affordance, dan collective affordance. Ketiga affordance tersebut berfungsi sebagai mekanisme yang menjelaskan bagaimana penggunaan video partisipatif dapat diterjemahkan menjadi hasil advokasi yang lebih efektif.

Keempat, artikel ini memperkenalkan konteks empiris yang masih relatif kurang terwakili dalam literatur internasional, yaitu organisasi perempuan adat. Sebagian besar penelitian sebelumnya dilakukan pada organisasi non-pemerintah, gerakan sosial perkotaan, atau organisasi lingkungan hidup. Dengan mengangkat Perempuan AMAN sebagai konteks penelitian, artikel ini memperluas pemahaman mengenai penggunaan teknologi digital dalam organisasi berbasis komunitas adat yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan politik yang berbeda.

Secara keseluruhan, kontribusi utama artikel ini terletak pada pengembangan kerangka konseptual yang menghubungkan kepemimpinan transformasional, penggunaan video partisipatif, affordance digital, dan efektivitas advokasi kebijakan dalam satu model yang terintegrasi. Dengan demikian, artikel ini menawarkan agenda penelitian baru bagi studi kepemimpinan, teknologi digital, dan advokasi masyarakat adat yang dapat diuji lebih lanjut melalui penelitian empiris pada masa mendatang.

## KESIMPULAN

Artikel ini mengembangkan sebuah kerangka konseptual yang mengintegrasikan Transformational Leadership Theory dan Affordance Theory untuk menjelaskan bagaimana penggunaan video partisipatif berpotensi meningkatkan efektivitas advokasi kebijakan dalam organisasi perempuan adat. Model yang diusulkan menempatkan kepemimpinan transformasional sebagai faktor yang mendorong pemanfaatan video partisipatif, yang selanjutnya memungkinkan aktivasi tiga affordance digital utama, yaitu visibility affordance, narrative affordance, dan collective affordance. Ketiga affordance tersebut diposisikan sebagai mekanisme yang menghubungkan penggunaan teknologi digital dengan efektivitas advokasi kebijakan.

Kontribusi utama artikel ini terletak pada pengembangan model konseptual yang menghubungkan literatur kepemimpinan, teknologi digital, dan advokasi masyarakat adat yang selama ini cenderung berkembang secara terpisah. Dengan mengintegrasikan kedua perspektif teoritis tersebut, artikel ini menawarkan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai bagaimana faktor organisasi dan karakteristik teknologi dapat berinteraksi dalam mendukung proses advokasi berbasis komunitas.

Dari perspektif teoritis, artikel ini memperluas penerapan Transformational Leadership Theory ke dalam konteks organisasi perempuan adat yang masih relatif kurang mendapat perhatian dalam literatur manajemen dan organisasi. Selain itu, artikel ini memperluas penerapan Affordance Theory dengan mengidentifikasi visibility affordance, narrative affordance, dan collective affordance sebagai mekanisme yang relevan dalam konteks advokasi digital berbasis komunitas. Dengan demikian, artikel ini memberikan landasan konseptual bagi penelitian masa depan yang berupaya memahami hubungan antara kepemimpinan, teknologi digital, dan perubahan sosial.

Dari perspektif praktis, model yang diusulkan memberikan kerangka pemikiran bagi organisasi masyarakat adat, lembaga pembangunan, organisasi donor, dan pembuat kebijakan dalam merancang strategi advokasi digital yang lebih partisipatif dan inklusif. Secara khusus, artikel ini menyoroti pentingnya pengembangan kapasitas kepemimpinan dan kemampuan produksi media komunitas sebagai bagian dari strategi penguatan advokasi masyarakat adat di era transformasi digital.

Meskipun demikian, artikel ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, model yang dikembangkan masih bersifat konseptual dan belum diuji secara empiris. Oleh karena itu, hubungan antar konstruk yang diusulkan masih memerlukan

verifikasi melalui penelitian lapangan. Kedua, model ini dikembangkan berdasarkan konteks organisasi Perempuan AMAN sehingga relevansinya pada konteks organisasi lain perlu dikaji lebih lanjut. Ketiga, artikel ini berfokus pada video partisipatif sebagai teknologi utama advokasi digital dan belum mempertimbangkan secara mendalam bentuk teknologi digital lainnya yang mungkin memiliki karakteristik *affordance* yang berbeda.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian mendatang disarankan untuk melakukan pengujian empiris terhadap model yang diusulkan menggunakan pendekatan *mixed methods* sebagaimana dirancang dalam artikel ini. Penelitian selanjutnya juga dapat mengeksplorasi peran variabel lain, seperti kapasitas organisasi, literasi digital, dukungan jaringan advokasi, serta faktor kelembagaan yang berpotensi memengaruhi efektivitas advokasi digital. Selain itu, studi komparatif pada berbagai organisasi masyarakat adat di tingkat nasional maupun internasional dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana teknologi digital dimanfaatkan untuk memperkuat representasi, partisipasi, dan pengaruh masyarakat adat dalam proses kebijakan publik.

Secara keseluruhan, artikel ini menawarkan sebuah agenda penelitian baru yang menghubungkan kepemimpinan transformasional, video partisipatif, *affordance* digital, dan efektivitas advokasi kebijakan dalam satu kerangka konseptual yang terintegrasi. Kerangka tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan penelitian empiris dan penguatan praktik advokasi masyarakat adat pada masa mendatang.

### Author Contributions

**Conceptualization:** Margareta Seting T. Beraan; **Methodology:** Margareta Seting T. Beraan; **Formal Analysis:** Margareta Seting T. Beraan; **Investigation:** Margareta Seting T. Beraan; **Resources:** Margareta Seting T. Beraan; **Writing—Original Draft Preparation:** Margareta Seting T. Beraan; **Writing—Review and Editing:** Margareta Seting T. Beraan and Prof. Hamdani; **Validation:** Prof. Hamdani; **Visualization:** Margareta Seting T. Beraan; **Supervision:** Prof. Hamdani; **Project Administration:** Margareta Seting T. Beraan.

Prof. Hamdani contributed as an academic reviewer and supervisor by providing substantial intellectual input, critical review, and methodological guidance, particularly in the development of the conceptual framework, refinement of theoretical arguments, formulation of research propositions, and improvement of the proposed research design. Margareta Seting T. Beraan served as the principal investigator and lead author responsible for the conceptualization, development of the research framework, literature synthesis, manuscript preparation, and overall coordination of the study.

All authors have read and agreed to the published version of the manuscript.

### Funding

This research received no external funding.

### Data Availability Statement

No empirical data were collected, generated, or analyzed in this study because the article is developed as a conceptual paper and research proposal. Consequently, data sharing is not applicable to the present study. Future empirical research derived from the proposed framework is expected to comply with applicable institutional, ethical, and data-sharing requirements.

### Acknowledgments

The authors would like to acknowledge Persekutuan Perempuan Adat Nusantara (Perempuan AMAN), indigenous women leaders, community facilitators, and community-based advocacy practitioners whose experiences, initiatives, and ongoing efforts inspired the development of the conceptual framework presented in this article. The authors also

appreciate the constructive feedback provided by colleagues and academic peers during the preparation and refinement of this manuscript.

The authors further confirm that artificial intelligence (AI)-assisted tools were used solely for language refinement, editorial assistance, formatting support, and drafting facilitation. All conceptual development, theoretical interpretation, scholarly analysis, and final decisions regarding the content of the manuscript remain entirely the responsibility of the authors.

### Conflicts of Interest

The authors declare no conflict of interest.

### REFERENCES

- [1] B. M. Bass, *Leadership and Performance Beyond Expectations*. New York, NY, USA: Free Press, 1985.
- [2] B. J. Avolio and B. M. Bass, *Developing Potential Across a Full Range of Leadership: Cases on Transactional and Transformational Leadership*. Mahwah, NJ, USA: Lawrence Erlbaum Associates, 2002.
- [3] T. A. Judge and R. F. Piccolo, "Transformational and transactional leadership: A meta-analytic test of their relative validity," *Journal of Applied Psychology*, vol. 89, no. 5, pp. 755–768, 2004, doi: 10.1037/0021-9010.89.5.755.
- [4] D. V. Day and J. Antonakis, "Leadership: Past, present, and future," *Journal of Management*, vol. 38, no. 1, pp. 57–67, 2012, doi: 10.1177/0149206311407501.
- [5] J. J. Gibson, *The Ecological Approach to Visual Perception*. Boston, MA, USA: Houghton Mifflin, 1979.
- [6] I. Hutchby, "Technologies, texts and affordances," *Sociology*, vol. 35, no. 2, pp. 441–456, 2001, doi: 10.1177/0038038501035002006.
- [7] P. M. Leonardi, "When flexible routines meet flexible technologies: Affordance, constraint, and the imbrication of human and material agencies," *MIS Quarterly*, vol. 35, no. 1, pp. 147–167, 2011, doi: 10.2307/23043493.
- [8] J. W. Treem and P. M. Leonardi, "Social media use in organizations: Exploring the affordances of visibility, editability, persistence, and association," *Communication Yearbook*, vol. 36, pp. 143–189, 2013, doi: 10.1080/23808985.2013.11679130.
- [9] P. M. Leonardi, "Theoretical foundations for the study of sociomateriality," *Information and Organization*, vol. 23, no. 2, pp. 59–76, 2013, doi: 10.1016/j.infoandorg.2013.02.002.
- [10] M. Faraj and B. Azad, "The materiality of technology: An affordance perspective," in *Materiality and Organizing*, Oxford, UK: Oxford University Press, 2012, pp. 237–258.
- [11] M. Castells, *Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age*, 2nd ed. Cambridge, UK: Polity Press, 2015.
- [12] Z. Tufekci, *Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of Networked Protest*. New Haven, CT, USA: Yale University Press, 2017.
- [13] J. Earl and K. Kimport, *Digitally Enabled Social Change: Activism in the Internet Age*. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2011.
- [14] W. H. Dutton, "The Fifth Estate emerging through the network of networks," *Prometheus*, vol. 27, no. 1, pp. 1–15, 2009, doi: 10.1080/08109020802657453.
- [15] B. Bimber, A. J. Flanagin, and C. Stohl, *Collective Action in Organizations*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2012.
- [16] S. Lunch and C. Lunch, *Insights into Participatory Video: A Handbook for the Field*. Oxford, UK: InsightShare, 2006.
- [17] S. Kindon, "Participatory video in geographic research: A feminist practice of looking?," *Area*, vol. 35, no. 2, pp. 142–153, 2003, doi: 10.1111/1475-4762.00236.

- [18] N. Johansson, E. Knippel, B. DeWitt, and S. Nyamupangedengu, "Participatory video and community empowerment: A case study from Southern Africa," *Action Research*, vol. 17, no. 4, pp. 493–511, 2019, doi: 10.1177/1476750318789474.
- [19] C. Milne, A. Mitchell, and N. de Lange, *Handbook of Participatory Video*. Lanham, MD, USA: AltaMira Press, 2012.
- [20] M. Couldry, "Mediatization or mediation? Alternative understandings of digital storytelling," *New Media & Society*, vol. 10, no. 3, pp. 373–391, 2008, doi: 10.1177/1461444808089414.
- [21] J. Burgess, *Digital Storytelling and Social Media*. New York, NY, USA: Routledge, 2019.
- [22] N. Couldry and U. A. Mejiias, *The Costs of Connection*. Stanford, CA, USA: Stanford University Press, 2019.
- [23] S. Vromen, B. Xenos, and A. Loader, "Young people, social media and connective action," *Information, Communication & Society*, vol. 18, no. 1, pp. 80–94, 2015, doi: 10.1080/1369118X.2014.889190.
- [24] J. F. Hair Jr., G. T. M. Hult, C. M. Ringle, and M. Sarstedt, *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*, 3rd ed. Thousand Oaks, CA, USA: Sage Publications, 2022.
- [25] C. M. Ringle, S. Wende, and J. Becker, *SmartPLS 4 User Manual*. Oststeinbek, Germany: SmartPLS GmbH, 2024.
- [26] J. W. Creswell and V. L. Plano Clark, *Designing and Conducting Mixed Methods Research*, 3rd ed. Thousand Oaks, CA, USA: Sage Publications, 2018.
- [27] M. Q. Patton, *Qualitative Research and Evaluation Methods*, 4th ed. Thousand Oaks, CA, USA: Sage Publications, 2015.
- [28] D. A. Gioia, K. G. Corley, and A. L. Hamilton, "Seeking qualitative rigor in inductive research: Notes on the Gioia methodology," *Organizational Research Methods*, vol. 16, no. 1, pp. 15–31, 2013, doi: 10.1177/1094428112452151.
- [29] K. M. Eisenhardt and M. E. Graebner, "Theory building from cases: Opportunities and challenges," *Academy of Management Journal*, vol. 50, no. 1, pp. 25–32, 2007, doi: 10.5465/AMJ.2007.24160888.
- [30] L. T. Smith, *Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples*, 3rd ed. London, UK: Zed Books, 2021.
- [31] F. Berkes, *Sacred Ecology*, 4th ed. New York, NY, USA: Routledge, 2018.
- [32] M. Walter and C. Andersen, *Indigenous Statistics: A Quantitative Research Methodology*. Walnut Creek, CA, USA: Left Coast Press, 2013.
- [33] S. Cobb, "Speaking of violence: The politics and poetics of narrative in conflict resolution," *Oxford University Press*, 2013.
- [34] M. de Lange and J. Burgess, "The role of storytelling in participatory media," *Media International Australia*, vol. 154, no. 1, pp. 96–107, 2015, doi: 10.1177/1329878X1515400112.
- [35] R. M. Ryan and E. L. Deci, "Intrinsic and extrinsic motivation from a self-determination theory perspective," *Contemporary Educational Psychology*, vol. 61, p. 101860, 2020, doi: 10.1016/j.cedpsych.2020.101860.